EKONOMI POLITIK dan PEMBANGUNAN

Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Ekonomi Politik dan Pembangunan

Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang

Ekonomi Politik dan Pembangunan

Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Kerja Sama

Ekonomi Politik dan Pembangunan

Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan
Negara Sedang Berkembang

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Editor Bahasa : Yuki Hana EF
Proof Reader : Sandra Siti Syarifah
Desain Cover dan Lay Out : Andri Alamsyah

PT Penerbit IPB Press
Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama: Juni 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-979-493-249-0

Tahun Terbit Elektronik: 2018

eISBN: 978-602-440-313-3

Kata Pengantar Penerbit

Kita sudah banyak mencatat bahwa kenyataan adanya hegemoni Negara Industri Maju (NIM) dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial-budaya, militer, dan seterusnya). Hal itu juga karena dilandasi oleh teori-teori yang mendasarinya, yakni terutama pendekatan teori liberal dan neoliberal yang bisa ampuh dipakai oleh NIM namun belum tentu kompatibel dipakai oleh NSB. Kemudian, pendekatan struktural/ radikal diakui sebagai teori yang paling berwibawa sepanjang dalam koridor "teori berbasis positif-empiris" -untuk membedakan dengan "teori normatif"- dalam menguak kelemahan bahkan kepalsuan teori-teori liberal yang kini telah mendominasi dasar-dasar pembuatan kebijakan di NIM maupun NSB.

Sementara itu, teori heterodoks -tidak dalam pengertian "teori campuran" antara liberal dan struktural- tapi merupakan "teori-teori kecil" yang telah berhasil menjelaskan "cerita sukses" untuk wilayah tertentu yang umumnya berada di Asia dan yang "menyempal" (*heterodoks*) dari "*grands theories"* baik yang berasal dari pendekatan teori liberal maupun struktural. Teori-teori heterodoks ini penting dielaborasi sehubungan dengan Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah Asia yang para pakar sering menyebut adanya "jalan Asia" (*Asian way*). Salah satu ciri penting dari pendekatan teori heterodoks adalah pentingnya nilai-nilai, baik yang berasal dari nilai agama maupun nilai tradisional yang telah menciptakan "kearifan lokal" (*local wisdom*) dan "kecerdasan lokal" (*local genius*). Oleh karena itu, di bagian akhir buku ini disajikan pembahasan isu "Ekonomi Syariah dalam perspektif Keadilan Sosial". Hal ini mengingat perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia yang sangat mengesankan. Sehingga dapat menjadi bagian tersendiri ataupun bagian dari konstruksi yang menjelaskan adanya teori heterodoks.

Selanjutnya dalam buku ini disajikan pula pembahasan tentang pelbagai topik yang aktual seperti problem-problem: globalisasi; kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; industrialisasi, pertanian dan informalisasi ekonomi; korupsi, inefisiensi dan kebocoran; utang luar negeri; dan kerusakan lingkungan. Topik-topik tersebut dibahas secara empiris-historis dan

dianalisis dalam perspektif teori ekonomi-politik dan pembangunan dalam rangka kepentingan NSB umumnya dan Indonesia khususnya.

Buku ini dapat sebagai buku pengantar teori ekonomi politik dan pembangunan bagi mahasiswa S1 dan S2 di Fakultas-Fakultas Ekonomi atau di Sekolah-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ciri khas buku ini adanya pendekatan komparatif teori-teori. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis bahkan mengkritik kondisi Negara-Negara Sedang Berkembang (NSB), khususnya Indonesia sekaligus untuk mengilhami dalam mencari solusinya. Perbandingan teori-teori tersebut melingkupi teori liberal, struktural/radikal dan heterodoks.

Dengan demikian buku ini sangat menarik, baik untuk kepentingan pengajaran di lingkungan perguruan tinggi, maupun bacaan khalayak luas yang bisa mencerahkan dan dapat memberi inspirasi untuk memahami, mengkritik serta mencari jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi dalam perekonomian di NSB umumnya dan di Indonesia khususnya.

Atas nama pengelola PT Penerbit IPB Press, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Didin S. Damanhuri yang selama ini dikenal sangat produktif menulis dan menerbitkan buku-buku ilmiah. Semoga buku ini merupakan bagian dari syiar kebajikan yang beliau hasilkan.

Bogor April 2010

Prof. Dr. Ir. Tb Sjafri Mangkuprawira

Komisaris Utama PT Penerbit IPB Press

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Buku ini awalnya adalah modul yang menjadi pegangan bagi mahasiswa STEI Tazkia yang mengambil mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Namun dengan buku yang tersaji sekarang diuraikan berbagai teori dan pendekatan Ekonomi Politik dan Pembangunan yang dapat dijadikan referensi untuk menganalisis masalah Ekonomi Politik dan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang (NSB), khsusnya Indonesia. Tentu saja dapat dijadikan bahan referensi bagi para mahasiswa S1 dan S2 maupun yang berminat dengan topik tersebut. Kemudian, pada bab-bab akhir buku ini disajikan berbagai permasalahan dan problematika yang selama ini dihadapi oleh NSB dalam konteks ekonomi politik dan pembangunan. Pembahasan dalam bab-bab tersebut diperkaya dengan berbagai macam studi kasus, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dalam pembahasannya juga dikemukakan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Dengan memahami secara mendalam beberapa pendekatan teori yang dikemukakan dalam buku ini, mahasiswa diharapkan mampu menjawab tantangan perekonomian Indonesia ke depan. Pengkayaan wacana tentang berbagai teori dan pendekatan ekonomi politik dan pembangunan akan menjadikan mahasiswa memiliki berbagai opsi solusi dalam memecahkan masalah. Dengan begitu, mereka akan menjadi fleksibel dan tidak lagi bersifat kaku dan terkurung oleh satu arus pemikiran dan pendekatan saja.

Buku ini merupakan langkah awal untuk bahan ajar ekonomi politik dan pembangunan. Sebagai langkah awal, buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itulah, pada tahap selanjutnya akan diadakan penambahan serta revisi terhadap buku ini. Penulis sangat berterima kasih terhadap seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Selain itu, penulis juga menerima beberapa masukan untuk kesempurnaan buku.

Yang perlu diingat adalah bahwasanya buku ini bukanlah satu-satunya buku rujukan bagi mahasiswa. Kemajuan dan keluasan wacana mahasiswa akan tergantung usaha mereka dalam mencari dan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang ada di berbagai referensi yang berkaitan. Namun lebih jauh, buku ini pun kiranya dapat dibaca oleh para khalayak dan peminat ekonomi-politik dan pembangunan secara lebih luas.

Bogor, April 2010

Penulis

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Daftar Isi

Bab 1

Pengertian Ekonomi Politik dan Pembangunan

Teori diibaratkan sebuah obat. Kemanjuran sebuah obat akan tergantung identifikasi penyakit yang dialami oleh pasien. Pemakaian obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya atau pemakaian obat yang over dosis terkadang bukan menyembuhkan penyakit, akan tetapi malah menimbulkan penyakit baru.

Tidak semua yang keluar dari dubur ayam adalah kotoran, akan tetapi ada juga telur yang keluar darinya yang memiliki gizi tinggi dan nikmat. Jadi ambillah telur dari teori yang ada dan buanglah jauh-jauh kotoran yang keluar dari teori tersebut.

A. Pendahuluan

Selama ini, program ekonomi yang dijalankan banyak Negara-Negara Sedang Berkembang (NSB) sering berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB (*growth of GDP*) semata. PDB seakan menjadi kunci kesuksesan bagi perekonomian kebanyakan negara. Pertumbuhan PDB yang tinggi dianggap sebuah keberhasilan, sebaliknya penurunan PDB dianggap sebuah kemunduran ekonomi. Oleh karena itulah, banyak negara yang berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan PDB mereka setinggi mungkin. Padahal kalau kita pelajari lebih mendalam, ada beberapa hal penting selain hanya pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PDB yang tinggi tidak bisa menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan terkadang peningkatan GDP tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dengan cara mengorbankan kesejahteraan kebanyakan masyarakat bawah. Padahal kalau kita lihat tujuan utama dari ilmu ekonomi adalah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Persoalan kesejahteraan masyarakat menyangkut bagaimana peran negara dan pasar dalam kaitannya dengan persoalan kualitas dari pertumbuhan PDB yang dihasilkan, mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di NSB. Hal itu berarti menyangkut ilmu ekonomi pembangunan. Sementara persoalan kualitas pertumbuhan yang diperankan negara dan pasar juga akan menyangkut dengan dimensi politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, kita juga harus memahami hubungan timbal balik antara aspek, proses, institusi politik dan kekuasaan dengan kegiatan serta *output* ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan seterusnya) dengan kualitas pertumbuhan (dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan). Yang terakhir ini berarti menyangkut ilmu ekonomi politik.

Dari sinilah kiranya kita perlu mempelajari ilmu ekonomi politik dan ilmu ekonomi pembangunan sekaligus. Maka buku ini pun berjudul *EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN*. Dengan demikian, diharapkan kita dapat memahami berbagai pendekatan teori secara komparatif: teori liberal, radikal/struktural dan heterodoks yang akan dibahas dalam buku ini, sehingga para mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap paradigma dan program ekonomi yang sedang berjalan. Pemahaman yang mendalam tentang ekonomi politik dan pembangunan diharapkan bisa menjadi bahan analisis di dunia nyata (*empirical evident*). Hal ini terutama ketika kita menempati beberapa posisi penting dalam pengambil keputusan/kebijakan. Dengan wawasan yang luas tentang ekonomi politik dan pembangunan tersebut, diharapkan kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek sebelum akhirnya mengambil keputusan/kebijakan.

B. Pertumbuhan, Pembangunan Ekonomi, dan Problem Politik

Banyak yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan istilah yang sama. Keduanya juga terkadang diidentikkan dengan pertumbuhan PDB dari sebuah negara. Padahal pengertian dari keduanya memiliki perbedaan.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pertumbuhan ekonomi mengacu kepada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika

sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Sedangkan pembangunan ekonomi memiliki arti yang jauh lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, Sumitro Djojohadikusumo menggunakan istilah pembangunan bagi permasalahan dalam perekonomian negara-negara berkembang.

Senada dengan Sumitro Djojohadikusumo, A. Madisson juga membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan yang terjadi di negara maju. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pendapatan yang terjadi di negara miskin.

Dari beberapa pemaparan di atas, kita mengetahui istilah NSB dan Negara Industri Maju (NIM). Lalu pertanyaannya adalah apa kriteria sebuah negara dikatakan sebagai negara sedang berkembang? Di sinilah banyak kalangan yang memberikan kriteria sebuah negara disebut NSB. Di antaranya adalah berdasarkan kepada perbedaan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing negara.

Menurut M.L. Jhingan ada beberepa ciri yang secara tidak langsung juga merupakan problematika ekonomi pembangunan dari negara berkembang. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Kemiskinan umum

Salah satu ciri negara berkembang adalah banyaknya kemiskinan di negara tersebut. Kemiskinan ini tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita penduduk di negara tersebut, yaitu di bawah 2 dolar AS per hari atau 1 dolar AS per hari (kemiskinan absolut) sebagaimana kriteria yang dipakai oleh Bank Dunia.

2. Mata pencaharian utama dalam bentuk pertanian

Dua per tiga penduduk di negara berkembang tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian pertanian. Penduduk yang bekerja di bidang pertanian di negara berkembang 4 kali lebih banyak dibandingkan di negara maju.

Pemusatan yang berlebihan pada sektor pertanian merupakan tanda kemiskinan, apalagi bila pengelolaannya dilakukan dengan cara tradisional dan teknologi rendah. Berbeda dengan negara maju yang menggunakan teknologi tinggi, produktivitas dari pertanian mereka jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang, meskipun hanya dikelola oleh sebagian kecil masyarakatnya dan lahan yang terbatas juga. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pertanian India dan Amerika dalam tabel berikut.

Tabel rata-rata hasil tanaman pangan (100 kg per hektar)

Tanaman	Tahun	India	Amerika
Gandum	1979	15,7	23
Padi	1979	17,9	51,4
Jagung	1979	9,1	68,6
Jowar	1979	4,9	39,5

Sumber: ekonomi pembangunan dan perencanaan karya M.L. Jhingan

3. Ekonomi dualistis

Salah satu ciri negara berkembang adalah adanya dualisme perekonomian. Di mana, di satu pihak perekonomian terpusat di kota dengan struktur yang modern dan maju serta berorientasi pada industri dan perdagangan, di pihak lain di pedesaan dengan segala keterbelakangannya dan berorientasi pada pertanian.

4. Sumber alam kurang terkelola

Sebagian besar negara berkembang adalah negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia dan India. Namun sayangnya sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik. Mereka seakan-akan dininabobokan oleh sumber daya alam yang merupakan anugerah terbesar Tuhan tersebut. Akibatnya, produktivitas mereka pun sangat rendah dibandingkan dengan negara maju yang tidak dimanjakan oleh sumber daya alam yang melimpah seperti Jepang.

5. Tingginya tingkat pengangguran

Jumlah pengangguran termasuk juga pengangguran tersembunyi sangat besar di negara berkembang. Pengangguran di kota bahkan membengkak

seiring dengan adanya urbanisasi. Urbanisasi tersebut tidak diikuti oleh kemajuan sektor industri yang meningkat. Akibatnya, terjadilah pengangguran dalam jumlah yang cukup besar.

6. Ekonomi yang terbelakang

Keterbelakangan ekonomi di negara berkembang ditandai dengan rendahnya efisiensi dan produktivitas tenaga kerjanya. Rendahnya produktivitas tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang rendah serta gizi dan kesehatan yang buruk.

7. Ketiadaan inisiatif dan usaha

Salah satu ciri khas NSB adalah tidak adanya kemampuan wiraswasta. Kurangnya kemampuan wiraswasta tersebut akibat sistem sosial yang menghalangi dan menutup daya cipta. Kekuatan adat istiadat, kekakuan status, dan kecurigaan pada gagasan baru dan kecurigaan terhadap keinginan intelektual telah menciptakan iklim yang tidak menunjang eksperimen dan inovasi. Selain itu, pasar yang sempit, ketiadaan modal, ketiadaan milik pribadi, ketiadaan kebebasan berkontrak, ketiadaan hukum dan ketertiban telah merintangi prakarsa dan usaha. Pada kebanyakan NSB, tidak saja perusahaan swasta tetapi juga perusahaan negara sulit tumbuh karena mekanisme administrasi tidak bekerja secara efisien.

Negara dengan struktur seperti di atas hanya memiliki sekelompok kecil pedagang yang sebagian besar berdagang barang konsumsi. Karena jumlahnya sedikit, tidak jarang kewiraswastaan tersebut cenderung menjadi monopolistis atau kuasi monopolistis. Para wiraswastawan membangun hubungan pribadi dan politik dengan pejabat pemerintah serta menikmati suatu kedudukan istimewa dan menerima perlakuan khusus di bidang keuangan, pajak, dan hal-hal lainnya.

8. Kelangkaan alat modal

NSB banyak diartikan sebagai sebuah perekonomian yang miskin modal atau tabungan dan investasi yang rendah. Tidak hanya persedian modal yang rendah, namun akumulasi modal juga sangat rendah. Investasi bruto hanya berkisar 5-6 persen dari total pendapatan nasional bruto. Berbeda dengan negara maju yang berada pada kisaran 15-20 persen.

9. Keterbelakangan teknologi

Tingkat teknologi di negara berkembang sangat rendah serta tidak efisien. Keterbelakangan teknologi di negara berkembang tercermin dalam beberapa hal. *Pertama*, biaya produksi rata-rata tinggi meski upah buruh rendah. *Kedua*, tingginya rasio buruh, umumnya pada faktor harga yang konstan mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah. *Ketiga*, besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik serta jumlah barang modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu *output* nasional. Mengacu pada pendapat A. Madisson, menurut Sadono Sukirno (1981), secara sederhana ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang serta mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

Lebih jauh, di NSB kita tak hanya menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi (*Growth of Gross Domestik Product/GDP*), kualitas dari pertumbuhan serta bagaimana transformasi NSB menjadi NIM secara linier. Namun juga menyangkut kompleksitas kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, pada saat kita mempelajari ilmu ekonomi pembangunan di NSB, kita juga harus punya perhatian kepada pentingnya analisis yang mengkaitkan dengan problem politik dan kekuasaan. Hal ini karena umumnya di NSB kita akan berhadapan dengan bagaimana praktik demokrasi yang masih rendah bahkan otoriter, korupsi dan inefisiensi pembangunan, jebakan utang luar negeri, paradoks globalisasi hingga persoalan ketidakadilan sosial. Esensi ini adalah menyangkut persoalan ekonomi politik NSB.

Menurut Caporaso dan Levine, serta Joan Robinson, pengertian teori ekonomi-politik adalah teori yang memahami hubungan timbal balik antara aspek, proses, serta institusi politik dan kekuasaan. Hal tersebut juga melingkupi kegiatan dan *output* ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi), serta persoalan kapasitas pertumbuhan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Dengan demikian, buku ini mencoba memahami ilmu ekonomi politik dan ekonomi pembangunan sekaligus, karena persoalan pembangunan di NSB menyangkut bagaimana mencapai pertumbuhan yang berkualitas, transformasi NSB kepada NIM, serta memahami kompleksitas politik dan kekuasaan dalam proses pertumbuhan maupun transformasi dari NSB menjadi

NIM tersebut. Oleh karena itu, buku ini juga menguraikan pendekatan teori ekonomi politik dan pembangunan secara komparatif: liberal, radikal/ struktural, dan heterodoks, sehingga tujuan pemahaman problem ekonomi politik dan pembangunan lebih memadai.

C. Problem Ekonomi Politik dan Pembangunan di NSB (Negara Sedang Berkembang)

Pembahasan tentang pembangunan ekonomi dan problem ekonomi politik di NSB menjadi marak dibicarakan setelah perang dunia II. Hal ini tidak terlepas dari gelombang kebangkitan politik yang melanda bangsa Asia dan Afrika setelah perang dunia II usai. Negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Negara-negara yang baru merdeka tersebut adalah negara-negara miskin yang memiliki berbagai macam problematika yang kompleks. Belum lagi keadaan di atas diperparah dengan masalah penduduk yang sangat serius, berupa kepadatan penduduk dan perkembangan penduduk yang sangat cepat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan yang mutlak dan sangat mendesak. Dengan adanya pembangunan ekonomi inilah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, perkembangan ekonomi pembangunan juga tidak terlepas dari adanya perang dingin -pascaperang dunia II- antara dua negara adidaya yang memiliki idiologi ekonomi yang saling bertentangan yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet yang saat itu menjadi negara komunis sangat aktif memperluas pengaruh dan idiologinya ke seluruh dunia. Usaha itu pun ternyata membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari masuknya Kuba menjadi negara komunis pada permulaan tahun 1960-an dan China pada tahun 1975.

Perkembangan falsafah komunisme di atas ternyata mendapatkan reaksi yang sangat kuat dari Amerika Serikat. Amerika yang beridiologikan kapitalis berusaha menyetop perkembangan komunisme yang makin menyebar di dunia. Untuk itu, Amerika mengerahkan modal dan tenaga untuk membantu beberapa negara berkembang di bidang pertahanan dan pembangunan ekonomi. Amerika mulai menyebarkan idiologinya dengan cara membantu

memulihkan perekonomian Eropa Barat dan Jepang yang hancur akibat perang dunia II. Sejak saat itulah, Amerika dan negara-negara barat yang maju lainnya mulai gencar memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara-negara miskin dan berkembang.

Namun ironisnya, seringkali ada udang di balik batu dari bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju. Bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju tersebut tidak murni bertujuan untuk membantu negara berkembang mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Negara-negara maju menyadari dan mengetahui dengan sadar bahwa negara-negara berkembang yang diberi bantuan menyimpan kekayaan sumber daya alam melimpah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang yang dibantu pada akhirnya juga berpotensi menjadi pasar yang menggiurkan bagi hasil industri mereka. Selain itu, tidak sedikit bantuan tersebut ditujukan untuk memperkokoh cengkraman negara-negara maju dengan memiliki hak istimewa di negara-negara berkembang yang menjadi bekas jajahannya. Hal ini dapat kita lihat dari bantuan luar negeri yang dijalankan oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda yang sebagian besar diberikan kepada negara-negara bekas jajahannya.

Salah satu program pemberian bantuan yang cukup terkenal -yang dilakukan oleh negara maju kepada negara yang porak poranda akibat perang dunia ke dua- adalah program *Economic Recovery Act of* 1948 yang dilakukan pada masa Presiden US Harry S. Truman. Program ini bermula dari inisiatif sekretaris negara pada saat itu yang bernama George Marshall yang mengajukan konsep perbaikan ekonomi Eropa terutama dalam hal infrastruktur yang hancur akibat perang dunia. Oleh karena itulah, program yang ditandatangani oleh Truman pada 3 April 1948 ini sering disebut dengan *Marshall Plan*. Dana yang digunakan dalam program ini tergolong besar. Sampai dengan tahun 1950, ada sekitar USD 13,3 miliar bantuan yang disetujui oleh kongres Amerika dalam rangka rekonstruksi perekonomian Eropa. Program tersebut berhasil membangun kembali Eropa dan Jepang yang hancur akibat Perang Dunia II dan malahan praktis kedua wilayah tersebut mendampingi AS menjadi negara industri maju.

Hal yang menjadi persoalan adalah, sejak itu AS dan Eropa dalam memberikan bantuan luar negeri/utang kepada NSB sekaligus mendesakkan ideologi dan paradigma pembangunan dalam rangka menciptakan hegemoni ekonomi dan politik secara global. Namun ada semacam *blessing in disguise,*

Jepang yang mendapat kucuran bantuan dalam rangka *Marshall Plan*, bangkit menjadi raksasa ekonomi di kemudian hari, dan tak sepenuhnya mengikuti jalan Kapitalis-Liberalisme maupun Sosialis-Komunisme. Banyak Penulis menilai, paradigma ekonomi maupun politik Jepang berbeda. Jepang lebih mengedepankan konsensus dalam demokrasi politik. Kemudian, Jepang juga lebih memerankan peran negara, pasar, dan parlemen secara seimbang dalam paradigma ekonomi. Ketiga elemen tersebut bekerja sama dengan dunia swasta untuk meraih pasar ekspor. Sehingga sejak dasawarsa 1990, produk industri Jepang laris manis karena berbagai keunggulan teknologinya. Prestasi ekonomi tersebut didukung oleh proses politik dan ekonomi dengan apa yang disebut *Japan Incorporated* yang lebih mengedepankan kerja sama.

Sukses Jepang diikuti oleh negara-negara Asia lain: Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura sebagai generasi pertama. Kemudian diikuti generasi ke dua: Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Tapi patut dicatat bahwa Indonesia terkena krisis moneter tahun 1998 yang hingga pergantian kekuasaan dan sistem politik dari Otoriter menjadi Demokrasi, prestasi ekonominya belum pulih benar hingga sepuluh tahun kemudian. Akan tetapi, bagaimanapun penulis sempat mentasbihkan kedelapan negara Asia tersebut sebagai *Asian Miracle and New Industrial Countries.* Dalam buku ini, fenomena "jalan Asia" (*Asian way*) lebih dikategorikan sebagai penganut aliran teori heterodoks, yang menyempal dari jalan Kapitalis-Liberalisme maupun Sosialis-Strukturalisme.

D. Manfaat Mempelajari Ekonomi Politik dan Pembangunan

Mungkin banyak di antara kita yang sering bertanya apa sih gunanya kita belajar teori ekonomi pembangunan? Itu kan hanya teori yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada. Lebih ekstrem lagi, untuk apa kita belajar teori: liberal, radikal, dan heterodoks - misalnya yang diuraikan buku ini- yang ternyata gagal menjawab permasalahan? Bukankah bahaya bila kita mempelajari terori liberalisme dan sosialisme, karena akan lebih merusak tatanan ekonomi di NSB?

Di sinilah kiranya perlu kita bedakan antara liberalisme atau sosialisme sebagai sebuah teori dan sebagai idiologi. Sebagai idiologi, keduanya sangat berbahaya jika kita tanamkan atau diterapkan di Indonesia secara "tanpa

reserve". Namun sebagai sebuah teori banyak analisis-analisis dari keduanya yang dapat kita pelajari atau kita terapkan dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi. Beberapa teori liberal misalnya azas efisiensi, efektivitas, inovasi, dan *entrepreneurship* adalah beberapa azas yang sangat cocok diterapkan di Indonesia. Begitu juga beberapa teori radikal/struktural yang sosialistis, berupa pentingnya pemerataan pendapatan dan kesempatan yang sama dalam mengakses faktor produksi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang ada di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, kiranya kita tidak boleh terlalu apriori terhadap keberadaan sebuah teori. Dalam artian, tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu kotoran namun ada juga yang berupa telur. Sebaliknya, tidak semua yang keluar dari kerang itu intan namun ada juga yang gagal dan menjadi kotoran. Artinya, tidak ada satu teori pun yang benar secara mutlak atau salah secara mutlak. Hal yang terpenting bagi kita adalah mengambil teori-teori yang baik dan sesuai dengan kondisi di Indonesia serta membuang yang tidak baik atau tidak sesuai.

Menurut Boediono, teori diibaratkan sebuah obat. Kemanjuran sebuah obat akan tergantung identifikasi penyakit yang dialami oleh pasien. Obat batuk misalnya akan menjadi manjur bila diberikan kepada orang yang mengalami penyakit batuk dan tidak akan pernah mujarab bila diberikan kepada orang yang sakit TBC. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan obat batuk karena tidak bisa menyembuhkan sakit TBC, namun yang perlu kita permasalahkan adalah pemakaian obat batuk yang tidak sesuai dengan kondisi dan peruntukannya. Selain itu, takaran yang sesuai dan tidak *over* dosis merupakan syarat mutlak bagi kemanjuran sebuah obat. Ketidaksesuaian pemakaian obat atau pemakaian obat yang *over* dosis terkadang bukan menyembuhkan penyakit, akan tetapi malah menimbulkan penyakit baru.

Begitu juga dengan teori, sebuah teori muncul karena merespon keadaan yang terjadi pada saat teori itu diutarakan. Sebuah teori bisa bermanfaat dan berhasil memecahkan permasalahan, namun dalam kondisi yang lain terkadang dapat menimbulkan permasalahan baru. Inilah yang menjadi kritik bagi para pelajar Indonesia yang menempuh studi di luar negeri.

Banyak di antara mereka yang berusaha mengadopsi atau berusaha menerapkan seratus persen teori yang mereka peroleh dari negara asal mereka belajar di Indonesia. Akibatnya, tidak jarang penyusunan dan perencanaan pembangunan yang mereka buat tidak memperbaiki masalah malah menimbulkan masalah baru. Tidak heran bila pernah terungkap

sebuah kalimat sarkasme tentang pembangunan di Indonesia selama ini, yang mengatakan bahwa pertumbuhan GNP dalam sekitar dua dasawarsa jatuh bersamaan dengan ledakan diploma Ph.D yang pada umumnya adalah ekonom.

Kritikan senada juga pernah diungkapkan oleh Prof. Mubyarto. Menurutnya, ilmu ekonomi yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia, tidak lagi sebagai ilmu tetapi hanya sebagai seni. Artinya, cuma berkisar dalam siklus penerapan paradigma yang baku. Jarang sekali yang mencoba menguji keabsahan sebuah teori, apalagi mau mencoba memakai kerangka pemikiran di luar arus utama. Hal yang perlu diingat di sini adalah sebuah teori arus utama merupakan hasil refleksi dari akumulasi pengalaman sekelompok bangsa. Dengan demikian, keabsahannya pun tidak terlalu relevan bagi sekelompok bangsa yang lain. Hal ini mengingat bahwa konteks kesejahteraan beserta struktur sosial-politik antara negara-negara maju dengan negara berkembang memiliki banyak perbedaan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempelajari beberapa teori yang ada dalam ilmu ekonomi politik dan ilmu ekonomi pembangunan, para mahasiswa diharapkan memiliki wacana baru yang lebih luas. Melalui berbagai teori yang akan diuraikan, para mahasiswa diharapkan mampu memilah dan memilih teori mana yang sangat sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi.

Soal Latihan

1. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu ekonomi politik dan ekonomi pembangunan?
2. Jelaskan problem ekonomi politik dan pembangunan pasca terjadinya perang dunia ke-II?
3. Jelaskan tentang tujuan idiologis dan ekonomi di balik kebaikan hati negara-negara maju dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang pada masa perang dingin?
4. Apa kegunaan kita mempelajari ilmu ekonomi politik dan ekonomi pembangunan?
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai para sarjana Indonesia yang ingin mengadopsi sepenuhnya teori-teori yang mereka peroleh di negara barat tempat mereka belajar?

Referensi Utama:

Damanhuri, DS. 2009. Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

______________________. 2008. Ekonomi Politik. Slide Bahan Mata Kuliah Ilmu Ekonomi-Politik. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

______________________. 2009. Indonesia: Negara, *Civil Society*, dan Pasar dalam Kemelut Globalisasi. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

______________________. 2006. Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

______________________. 1997. Tinjauan Kritis atas Aliran-Aliran Pemikiran Ekonomi Dunia dan Implikasinya bagi Rekronstruksi Pemikiran Ekonomi Indonesia. Orientasi Pendalaman Bidang Tugas DPRD TK. I dan DPRD TK. II. Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.

Referensi Pendukung

Boediono. 2009. Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana? (Kumpulan Esai Ekonomi). Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.

Djojohadikusumo, S. 1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Jihan, ML. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerjemah: D Guritno. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sukirno, S. 1981. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Borta Gorat. Medan.

Yustika, A Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi. Bayumedia *Publishing*. Malang.